

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENERAPKAN
PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA SAPOBONTO
KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar*

Oleh :

AL IRFAN
10700113079
MAKASSAR

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Al Irfan
NIM : 10700113079
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 01 Desember 1994
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Perum Saumata indah Blok F 6
Judul : Peranan Pemerintah Desa Dalam Menerapkan Program
ADD (Alokasi Dana Desa) dan Implikasinya Terhadap
Pembangunan Di Desa Sapobonto Kecamatan
Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

Menyatakan dengan sungguh dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari merupakan suatu kegiatan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh akan batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar, 27 Maret 2018

Penyusun,

Al Irfan
10700113079

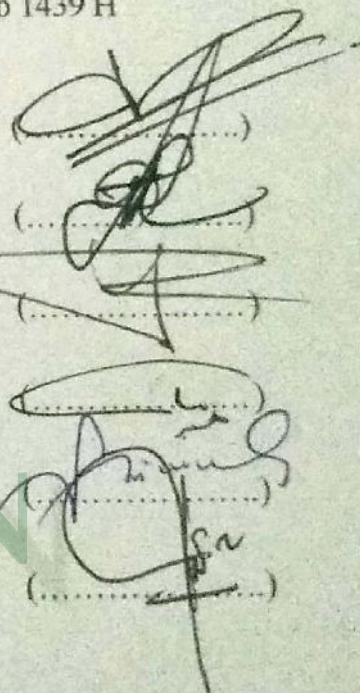
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Menerapkan Program ADD (Alokasi Dana Desa) Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba” yang disusun oleh Al Irfan, NIM: 10700113079, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 23 Maret 2018 M, bertepatan dengan 6 Rajab 1439 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ilmu Ekonomi

Makassar, 23 Maret 2018
6 Rajab 1439 H

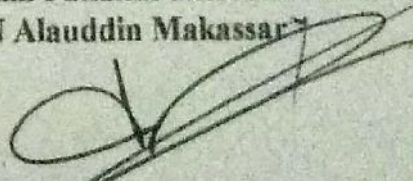
DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Sekertaris : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Penguji I : Dr. Urbanus Uma Leu, M.Ag.
Penguji II : Mustakim Muchlis, SE., M.Si.
Pembimbing I : Hasbiullah, SE., M.Si.
Pembimbing II : Hj. Wahidah Abdullah, S.Ag., M.Ag.



Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19580221 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Menerapkan Program ADD (Alokasi Dana Desa) dan Implikasinya Terhadap Pembangunan di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba” dengan baik. Shalawat dan Taslim semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa perubahan besar bagi umat manusia.

Penyusunan skripsi ini terselesaikan berkat adanya kerjasama, bantuan, arahan, bimbingan dan petunjuk-petunjuk dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih atas sumbangsih pemikiran, waktu dan tenaga serta bantuan moril dan materil khususnya kepada orang tua penulis Ayahanda Mahdiah dan Ibunda Harlina yang telah mendidiknya, menyekolahkanku serta tiada henti dalam memberikan cinta, kasih sayang dan doa, serta keluarga yang telah banyak membantu baik berupa dukungan materil maupun moril dan doa yang senantiasa menyertai penyusun sehingga dapat menyelesaikan proses perkuliahan ini dengan baik serta kupersembahkan karya kecil ini sebagai hadiah yang dapat anakmu persembahkan untuk membuat kalian tersenyum, bangga di hari tua dan sebagai balasan atas kerja keras kalian selama ini dan kepada saudara saya Mardiana

Dan tak lupa juga berterimah kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar dan para wakil Rektor serta seluruh jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Siradjuddin, SE., M.Si. dan Hasbiullah, SE., M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala bantuannya selama ini.
4. Bapak Hasbiullah, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Drs. Hj. Wahidah Abdullah, M.Ag., M.Pd selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Untuk bapak penguji komprehensif, Bapak Mustafa Umar, S.Ag., M.Ag, Bapak Akramunnas, SE., M.Si, dan Hasbiullah, SE., M.Si., yang telah mengajarkan kepada penulis bahwa untuk menjadi seorang sarjana itu tidaklah mudah, semua kesuksesan yang ingin dicapai butuh proses yang panjang dan perlu menghargai waktu.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Seluruh staf bagian akademik, tata usaha, jurusan dan perpustakaan kampus UIN dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penyusun mengucapkan terimakasih atas bantuannya dalam pelayanan akademik dan administrasi.

8. Terima kasih teman-teman seangkatan Ilmu Ekonomi B 2013,Miftahul fatrah, Izfah Ariandi, Syaiful Afdhal, Sofyan, Raden Pandi Atmaja, Ahmad Naufal Azhari, Muhammad Syamsul Rizal Nurmalia, Wahyuddin,Fajar Hidayat Asbar, Amar mu'arif, Hari Pratomo Yamin, Nurhikmah, S.E, Rahmah Amir S.E, Irma Setyawati S.E, Arniana S.E, Nadiah Muhlisani S,E, dan yang tidak sempat saya sebut namanya satu persatu.
9. Terima kasih juga buat kakanda Hamka Gie, Aswar Talib, S.E, Yakub, S.E, Supardi B, S.E, Zulkifli Idham, S.E, Agus Dwi Wijaya, S.E. Serta adinda Rahmat Hidayat, Imam Wahyudi, Ammar Akram Haidar, Junaedi yusuf, Haidir, Sahid Jafar, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Untuk teman-teman KKN Angkatan ke 54 Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba (Ali,Rahman,Fatih,Naas,Wahida, Kak Zakkir,Kak Abu Bakar, Nurul, Tika, dan Nurseha) karena berkat perkenalan dengan kalian, hidup bersama, bekerja bersama, semuanya itu memberikan pelajaran kepada penulis tentang bagaimana arti tanggung jawab yang sebenarnya.

Ucapan terimakasih dan permohonan maaf penulis juga kepada keluarga, sahabat, serta teman yang tidak sempat disebutkan namanya. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Penyusun juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan, sehingga penyusun tak lupa mengharapkan

saran dan kritik atas skripsi ini. Semoga skripsi ini memberi manfaat bagi semua pembaca. Aamiin.

Makassar, 27 Maret 2018

Penulis

Al Irfan
10700113079



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Teori Pembangunan daerah	10
B. Pengertian Pembangunan Desa	11
C. Peranan Pemerintah Desa.....	19
D. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD).....	28
E. Penelitian Terdahulu.....	34
F. Kerangka Konseptual	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
B. Rancangan Penelitian	39
C. Jenis dan Sumber Data	39
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Metode Pengolahan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Desa Sapobonto	42
B. Hasil Penelitian.....	49
C. Pembahasan	68
D. Implikasi Penelitian.....	74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

4.1	Jumlah Penduduk Dusun sesuai dengan dusun atau lingkungan.....	43
4.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sapobonto.....	44
4.3	Responden berdasarkan jenis kelamin	47
4.4	Responden Berdasarkan Tingkat Usia	47
4.5	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	48
4.6	Tahapan Perencanaan Pengelolaan ADD Desa Sapobonto Dalam Kegiatan Musrembang	52
4.7	Alokasi Penggunaan Anggaran ADD Tahun 2017	57
4.8	Penilaian Tahapan Pertanggung jawaban Pengelolaan ADD	61



DAFTAR GAMBAR

2.1	Kerangka Konseptual.....	38
4.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sapobonto	46



ABSTRAK

Nama Penyusun : Al Irfan
NIM : 10700113079
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa Dalam Menerapkan Program Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Pemerintah Desa dalam Menerapkan Program Alokasi Dana Desa (ADD) dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba serta pemanfaatan pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap pembangunan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang Menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan di desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Metode penelitian dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan subjek penelitian yang terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan masyarakat Desa Sapobonto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Pemerintah Desa dalam Menerapkan Program Alokasi Dana Desa (ADD) dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, terdapat tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dimana dalam tahap perencanaan alokasi dana desa dapat terselesaikan, namun karena yang dihasilkan tidak berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan serta kurangnya informasi dari pemerintah setempat, maka dapat dikatakan pada tahap ini masih kurang baik dan efektif, pada tahap pelaksanaan di mana penggunaan anggaran alokasi dana desa terselesaikan dengan baik namun transparansi informasi terkait oleh pemerintah desa kepada masyarakat masih kurang efektif dan pada laporan pertanggungjawaban proses pengelolaan alokasi dana desa kurang efektif, di mana seharusnya kegiatan evaluasi dilakukan bersama masyarakat Desa Sapobonto. Sedangkan faktor-faktor penghambat adalah sumber daya manusia yang kurang dari tim pelaksana pengelolaan, informasi, serta kurangnya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pembangunan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (*diskreksi*) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Adanya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa yang kini telah di terbitkan dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dari penjelasan di atas bahwa pemerintah sangat berperang dalam mengatur kepentingan masyarakat, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Qs. Al-hadid ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ
وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Terjemahan:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Qs. Al- Hadid ayat 7)

Dari penjelasan ayat di atas dalam surat Al-Hadid Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

Memang tak di pungkiri bahwa suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya didasarkan pada penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan Desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa

seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa.

Landasan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Menindak lanjuti peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah merealisasikan kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada setiap desa. Pemerintah Kabupaten Bulukumba mengeluarkan Peraturan Bupati Bulukumba Pasal 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba. Adapun besar Alokasi Dana Desa (ADD) yang didistribusikan pada, setiap desa pada tahun 2017 adalah Rp1,5 miliar perDesa. Di mana Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang merupakan desa penerima terbesar yang mencapai Rp1,6 Miliar. Sementara, Desa Lamanda, Kecamatan Bontotiro penerima dana desa terkecil sebesar Rp1,4 Miliar. Secara keseluruhan masing-masing desa di Kabupaten Bulukumba menerima anggaran Desa sebesar Rp1,5 Miliar. Penyerahan pada anggaran dana Desa tahun 2017 sebesar Rp1,5 Miliar, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa yaitu hingga mencapai Rp 1,5 miliar perdesa, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya sebelum melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistik oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Selain itu, Desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan tahir (2006:96) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu :

1. Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa, sejak dikeluarkan peraturan pemerintah No 6 tahun 2014 tentang desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksana baik sebagai pedoman maupun sebagai operasional.

3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.
4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan tugas dan pekerjaan.

Hal sama juga yang dialami oleh pemerintah Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Sejak digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sapobonto, yang tampak dari kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu pada Tahun 2015 pembangunan fisik, di antaranya pembangunan irigasi 2 titik, Pembangunan Drainase 2 titik, Pembangunan Dwickier, pembangunan talud, Pembangunan kantor/penambahan Gedung, Pembangunan tempat Parkir, Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar dan Pembangunan sumur umum.

Di tahun 2016 sudah tampak sebagian hasil dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut khusus pada pembangunan fisik, tahun 2016 ini sendiri Desa Sapobonto melakukan untuk pembangunan fisik, Pembangunan Saluran Irgasi 4 Titik, Pembangunan Rabat Beton 3 Titik, Pembangunan Drainase 2 Titik, Pembangunan Sumur Umum, Pembangunan Posyandu 2 Unit, Pembangunan

irigasi 4 titik. Pada tahun 2017 kembali pemerintah mengalokasikan Anggaran Dana Desa pada pembangunan fisik berupa Pembangunan irigasi Pattoengan, Pembangunan irigasi Lembanag, Peralatan Pembangunan irigasi, Rabat Beton Poros Bambaungan, Rambat Beton Poros SMK 75 M, Pengerasan jalan Tani Lembang 1 KM, Drainase Poros Lembang 88 M, Drainase Poros MTs 100 M, Drainase Poros Lembana 150 M, Drainase Poros Ili 200 M, Dwickir jalan Tani Lembang 2 buah, Drainase poros SMK 17 M.

Namun, setelah melakukan observasi awal ternyata dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut masih belum berjalan maksimal sesuai dengan tujuan ADD menurut Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 44 Tahun 2016 pasal 11 tentang pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat seperti pengadaan ketahanan pangan, pengembangan Masyarakat dan sosial budaya. karena yang selama ini tampak dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba adalah pembangunan fisik.

Mengenai hal tersebut tentunya akan memunculkan berbagai permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji berkaitan dalam proses pengelolaan alokasi dana desa. Sehingga kegiatan penelitian tentang masalah tersebut sangat penting untuk dilakukan, yaitu dengan melakukan penelitian untuk mengamati dan mencermati proses pengelolaan alokasi dana desa yang selama ini telah dilaksanakan, agar dapat mengetahui apakah dalam proses tersebut berjalan dengan baik.

Mengingat alokasi dana desa sangat di butuhkan oleh masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan pembangunan di desa Sapobonto agar berjalan efektif dan efisien, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Peranan pemerintah Desa dalam menerapkan program Alokasi Dana Desa (ADD) dan implikasinya Terhadap Pembangunan di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”, agar kedepannya dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah daerah Bulukumba maupun pemerintah Desa Sapobonto untuk lebih memahami dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, disini peneliti menentukan rumusan masalah penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan pemerintah Desa dalam menerapkan program Alokasi Dana Desa (ADD) dan implikasinya terhadap pembangunan Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana pemanfaatan pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembanguna di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba?
3. Faktor- Faktor apa yang memperhambat Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui peranan pemerintah Desa dalam menerapkan program Alokasi Dana Desa (ADD) dan implikasinya terhadap pembangunan Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembanguna Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba?
3. Untuk mengetahui Faktor- Faktor apa yang memperhambat Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan berbagai literatur ekonomi yang sudah ada, khususnya mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan pedesaan. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih peduli terhadap program-program dan kebijakan yang diberikan pemerintah untuk mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba apakah penyaluran Alokasi Dana

Desa sudah tepat sasaran, sehingga pemerintah dapat meminimalkan kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah di daerahnya. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Sapobonto agar pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.

3. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti selanjutnya atas bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya pembangunan pedesaan. Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dapat dikembangkan lebih lanjut serta menjadi acuan atau referensi untuk penelitian yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Teori Pembangunan Daerah*

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan peran pemerintah daerah dalam era etonomi luas, perencanaan pembangunan daerah di perlukan karena pelaksanaan pembangunan didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Riyadi deddy supriady Bratukusumah (2004;6) mengatakan perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (action plan).

Menurut Sjafrizal (2009;15), secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efesiensi sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Karena itu, perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementif (dapat terlaksanakan) dan aflikatif (dapat diterapkan).

Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusa-keputusan yang di dasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan di gunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkain kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (matrial) maupun non fisik (mental dan spritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Pembangunan daerah akan mencakup suatu ruang tertentu, sehingga di perlukan adanya penataan yang efektif dimana tata ruang akan mempengaruhi proses pembangunan besert implikasinya.

Ciri-ciri pembangunan daerah menurut riyandi, Denddy supriady barata kusumah (2004; 9) meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menghasilkan program-program yang bersifat umum.
2. Analisis perencanaan bersifat makro/luas
3. Lebih efektif dan efisien di gunakan untuk perencanaan jangka menengah dan panjang
4. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal, namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas.
5. Fleksibel dan mudah untuk di jadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka pendek (1 tahunan)

Bahwa perencanaan pembangunan daerah memerlukan koordinasi dari semua unsur yang terlibat dalam rangka menghasilkan sebuah program dan kegiatan yang holistik dan komprehensif, selain itu perencanaan pembangunan daerah harus mampu menentukan prioritas program dan kegiatan berdasarkan fakta dan data dari potensi daerahnya, serta harus mempunyai sumber daya yang interdisipliner, sehingga koordinasi sekali lagi sangat diperlukan dalam pembuatan sebuah perencanaan pembangunan yang terintegrasi, tersinkronisasi, dan menyeluruh.

B. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan Desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena Desa beserta masyarakatnya merupakan basis ekonomi, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

Menurut Kartasmita (2001 : 66) menyatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan di bangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Suparno (2001 : 46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat.

Dalam hal ini pembangunan yang dimaksudkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebagaimana firman Allah Ta'ala Q.S Shaad ayat 27 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

Terjemahan

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka”.

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan dalam isi kandungan Allah SWT menciptakan langit, bumi dan makhluk apa yang saja yang berada diantaranya tidak sia-sia. Baik yang tampak dipermukaannya maupun yang tersimpan didalamnya, sangat besar artinya bagi kehidupan manusia, manusia diciptakanNya untuk menjadi khalifa di muka bumi ini sehingga wajib untuk menjaga apa yang telah di karuniakan Allah SWT.

Kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2010-2014 diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana, sosial, ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi, serta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar.
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui peningkatan kualitasnya, dan penguatan kelembagaan serta modal sosial masyarakat pedesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan memenuhi hak-hak dasar.
4. Terciptanya lapangan kerja berkualitas di pedesaan, khususnya lapangan kerja non pemerintah

1. *Pengertian Partisipasi Masyarakat*

a. *Pengertian Partisipasi*

Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata “participation” yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut :

- a. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
- b. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beranekaragam dalam negara Pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
- c. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan, perencanaan, dan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan

sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.

- d. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Menurut Slamet (dalam Suryono 2001:124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan, ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan

masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Untuk menyukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Mengingat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjukan oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas.

3. *Pengertian Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development*

Pembangunan yang mengupayakan pemenuhan kebutuhan masa kini dengan tidak menurunkan atau mengurangi kemampuan generasi di masa depan dalam memenuhi kebutuhan mereka (orang-orang yang hidup di masa depan). Pembangunan berkelanjutan ini pertama kali dikenal pada tahun 1987, yang pada waktu itu dikenal sebagai laporan Brundlandt, nama ketua komisi yang bernama *World Commission on Environment and Development* (Komisi Sedunia Lingkungan dan Pembangunan). Pembangunan Berkelanjutan merupakan terjemahan dari istilah populernya pertama kali yaitu *Sustainable Development*, yang kalau diartikan ke bahasa Indonesia yakni :

- a. Sustainable = Berkelanjutan
- b. Development = Pembangunan

Pembangunan yang dimaksudkan dalam pengertian pembangunan berkelanjutan memiliki konteks yang luas, misalnya pembangunan kota atau

wilayah, lahan, masyarakat, bisnis, ekonomi dan lain sebagainya. Hal penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana memperbaiki atau mempertahankan kualitas lingkungan tanpa perlu mengorbankan keadilan sosial serta kebutuhan pembangunan ekonomi. Cara pandang terhadap pembangunan berkelanjutan tersebut harus dapat dipahami sebagai salah satu etika dalam politik pembangunan, yaitu komitmen moral terhadap pengorganisir dalam pembangunan, dilaksanakan untuk mencapai tujuan tanpa mengorbankan aspek-aspek lainnya.

Menurut A. Fauzi (2004), ada 3 alasan utama penggunaan istilah pembangunan berkelanjutan:

1. Ekologi

Nilai ekologi dari keanekaragaman hayati sangat tinggi, oleh sebab itu, kegiatan ekonomi seharusnya tidak hanya kepada pemanfaatan SDA atau lingkungan semata karena dapat mengancam fungsi ekologi tersebut.

2. Moral

Saat ini kita dapat menikmati kekayaan sumber daya alam serta lingkungan yang telah diolah menjadi barang, hendaknya secara moral kita harus memikirkan juga mengenai ketersediaan SDA untuk orang-orang yang hidup di masa depan. Kita tidak boleh melakukan aktivitas yang dapat mengambil sumber daya alam secara berlebihan yang akhirnya dapat merusak lingkungan, yang pada akhirnya merugikan generasi yang akan datang.

3. Ekonomi

Hingga saat ini masih dalam perdebatan apakah kegiatan ekonomi sudah memenuhi kriteria pembangunan berkelanjutan atau belum, karena ekonomi berkelanjutan tersebut biasanya bersifat paradoks, di satu sisi bisa disebut pembangunan berkelanjutan, disisi lainnya dapat mengurangi kualitas ekonomi lainnya, lingkungan atau moral.

4. Ciri-ciri dan Prinsip Pembangunan Desa

Menurut Yulianti & Poernomo (dalam Yuwono, 2001:23) Desa merupakan “satu kasatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa dan mengadakan pemerintahan tersendiri”. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri, seperti yang di kemukakan oleh Kasil (dalam Todaro dan Smith 2006:251) yaitu :

1. Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat.
2. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan esensial kegiatan masyarakat.

3. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan.
4. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.
5. Menggerakkan partisipasi, prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur keberibadian dengan teknologi tepat waktu.

Menurut Pedoman peningkatan kapasitas pemerintahan desa (2004:157) Perencanaan Pembangunan Desa Bersama Masyarakat (PPDBM) adalah model perencanaan pembangunan skala lingkungan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan adalah serangkaian kegiatan mulai dari indentifikasi kebutuhan masyarakat sampai dengan penetapan program pembangunan.
2. Pembangunan skala lingkungan adalah semua program peningkatan kemakmuran, kesejahteraan, ketentraman, dan kedamaian masyarakat dilingkungan pemukiman tingkat Rt, Rw, Dusun atau Desa.
3. Dari masyarakat adalah bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi, usulan, dan sumber daya masyarakat setempat.
4. Oleh masyarakat adalah mengikut sertakan warga dan kelembagaan masyarakat setempat.

5. Untuk masyarakat adalah menghasilkan program pembangunan yang berdampak peningkatan kemakmuran, kesejahteraan, ketentraman, dan kedamaian masyarakat

C. Peranan pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa

Kata "Desa" berasal dari bahasa sangsekerta "Desi" yang berarti "tanah air" atau "tanah kelahiran" (Patji, 1983:323).

Bintaro (1968: 95) mengemukakan bahwa "Desa adalah perwujudan geografis yang di timbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis, politis dan kultural yang terdapat di situ dalam hubugannya dan pengaruh timbal balik dengan lain". Bouman (1971:79), mengemukakan pendapat:

" Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal kebijakan termasuk di dalam hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha-usaha yang dapat pengaruhi oleh Hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial."

Dilihat dari segi hubungannya dengan penempatannya dalam susunan tertib pemerintah, maka desa diberi batasan sebagai berikut: "Desa atau nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan adalah pula badan pemerintahan yang merupakan bagian wilayah Kecamatan atau wilayah yang melindunginya (Bertha, 1982 :26)

Desa menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat

istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. (Widjaja, 2003: 3).

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut :

Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian Desa menurut Prof. HAW. Widjaja dan UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu Komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

2. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktur lainnya. Pemerintahan yang berisi lingkungan pekerjaan tetap disebut juga pemerintahan dalam arti statis, dan dapat

diartikan dalam arti dinamis, yang berisi gerak atau aktivitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasaan pemerintahan. Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat (*ambstrager*). Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan karena itu disebut pemerintah.

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, Pemerintahan Desa berdasarkan PP No. 47 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

a. Pemerintah Desa

1. Kepala Desa
2. Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di Desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari Kepala Desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.
3. Adapun Pengertian kepala Desa Menurut Tahmit Kepala Desa adalah pemimpin dari Desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari

Pemerintah Desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari, pambakal, hukum tua, perbekel, Peratin.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, perangkat Desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur Staf Sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang Administrasi Pemerintahan. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, ketentuan mengenai bidang urusan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara

proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan Keuangan Desa.

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perangkat Desa adalah bagian dari pemerintah Desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota dan perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa dalam membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

b. Badan Permusyawaratan Desa

Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6(enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut turut.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa struktur pemerintahan desa adalah susunan secara sistematis pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan BPD.

3. Peranan dan Fungsi Pemerintah Desa

a. Peranan dan Fungsi Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas kepala desa pada Pasal 26 ayat (2), Kepala Desa berperan:

- 1 Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2 Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- 3 Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- 4 Menetapkan Peraturan Desa.
- 5 Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 6 Membina kehidupan masyarakat Desa.
- 7 Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- 8 Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- 9 Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- 10 Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- 11 Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- 12 Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- 13 Mengordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.

- 14 Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15 Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Peranan dan Fungsi Perangkat Desa.

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

c. Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Kewenangan dan/atau Fungsi Pemerintahan Desa adalah wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

4. *Administrasi Keuangan Desa*

Menurut Istilah Administrasi berhubungan dengan kegiatan kerja sama yang dilakukan manusia atau kelompok sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Untuk lebih memahami mengenai Administrasi Pemerintahan Desa, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Administrasi, Administrasi Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan Desa.

Administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta

memudahkan memperoleh kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Administrasi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sebelumnya, apabila administrasi ditelaah lebih dalam, terlihat bermacam-macam cara atau pekerjaan yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan.

Administrasi Pemerintahan berasal dari istilah asing *Administration* (inggris) atau *Bestuurs Administrasi* (Belanda) dapat diartikan sebagai berikut:

1. Fungsi-fungsi pengendalian Administrasi oleh badan-badan atau Instansi Pemerintah dari segala tingkatan guna melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan Pemerintah sesuai dengan wewenang masing-masing seperti ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Penggunaan prinsip-prinsip serta ilmu Administrasi Negara oleh badan-badan atau instansi Pemerintah agar tertib administrasi ialah kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan organisasi, pembagian wewenang, hubungan kerja, koordinasi, sinkronisasi, delegasi wewenang, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan sebagainya.

Administrasi Pemerintahan Desa adalah semua kegiatan atau proses yang berhubungan dengan pelaksanaan dari tujuan Pemerintah Desa, di dalam pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa peraturan-peraturan di dalam IGO/IGOB tersebut merupakan landasan mengenai struktur, pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Pamong Desa sejak tahun 1905. Seperti yang kita ketahui Administrasi merupakan kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang/organisasi dalam

upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sama halnya dengan Administrasi Pemerintah Desa yang merupakan suatu organisasi yang dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih langsung oleh rakyat dan dibantu oleh perangkat-perangkat Desa lainnya.

Menurut Supriadi dalam bukunya “Desa Kita” mengartikan tentang Administrasi Pemerintahan Desa adalah: Semua kegiatan yang bersumber pada wewenang Pemerintah Desa yang terdiri atas tugas-tugas, kewajiban, tanggung jawab dan hubungan kerja, yang dilaksanakan dengan berlandaskan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menjalankan Pemerintahan Desa. (Supriadi, 1984: 48)

Kegiatan Tata Usaha Keuangan Pemerintahan Desa diantaranya yaitu :

1. Kepala desa berkewajiban mengelola mengenai pendapatan dan pengeluaran keuangan desa.
2. Mengerjakan pembukuan mengenai pendapatan dan pengeluaran keuangan milik Pemerintah Desa.
3. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
4. Membuat pertanggung jawaban keuangan desa.
5. Dan lain sebagainya.

Dari penjelasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan Administrasi Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat-perangkat Desa lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama.

D. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa biasa disebut dengan ADD adalah Alokasi khusus Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat Desa baik pembangunan fisik (sarana pra-sarana) maupun sumber daya manusia. Anggaran Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Dalam PP 6/2014 pasal 1 ayat 11 disebutkan : Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal Penjelasan PP 6/2014 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam Pasal Penjelasan pula disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk Pemerintahan Desa dan BPD.

Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai dari APBD yang dialokasikan kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi

Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa.

Menurut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Bab VIII Tentang Keuangan Dan Aset Desa Pasal 72, sumber - sumber pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan asli Desa yang terdiri dari Hasil Usaha Desa, Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan lain- lain Pendapatan Asli Desa
2. Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
3. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari dana perimbangan yang diterima kabupaten / kota.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
7. Lain – lain pendapatan desa yang sah

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten / Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif

sesuai potensi Desa dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja untuk mendorong peningkatan swadaya gotong - royong masyarakat.

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan-keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Desa. Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi.

1. Maksud, Tujuan, dan Sasaran Alokasi Dana Desa

Pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Selain itu, masyarakat desa memiliki beberapa hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya:

1. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
3. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;

4. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa.

Untuk mewujudkan apa yang menjadi kewajiban desa dan hak masyarakat desa tersebut maka sangat diperlukan tersedianya dana untuk itu. Salah satunya yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun maksud, tujuan dan sasaran dari ADD di Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:

a. Maksud

Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintahan Kabupaten Bulukumba kepada pemerintah desa yang berasal dari anggaran pendapatan Kabupaten Bulukumba, dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan didalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bulukumba Nomor 44 Tahun 2016 yaitu pada Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (5)

ADD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksana, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

b. Tujuan

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakatan di Desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
5. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/ miskin.

Selain itu, berdasarkan PermenDesa PD TT Nomor 22 Tahun 2016 pada pasal 5 disebutkan bahwa Dana desa di gunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, yang meliputi antara lain:

Pasal 5 M A K A S A R

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar pemenuhan kebutuhan:
 1. Lingkungan pemukiman;
 2. Transportasi;
 3. Energi; dan
 4. Informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. Kesehatan masyarakat; dan
 2. Pendidikan dan kebudayaan.

- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa yang meliputi:
 - 1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - 2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 - 3. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. Penanganan bencana alam;
 - 3. Penanganan kejadian luar biasanya lainnya; dan
 - 4. Pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.

c. Sasaran

Sasaran utama Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

- a. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
- d. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

E. Penelitian Terdahulu

Nurliana (2013), Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Pada proses Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa ADD dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara pemerintah desa telah melibatkan masyarakat desa dalam penyusunan rencana kegiatan dan penentuan kebijakan penggunaan Alokasi Dana

Desa (ADD) dan Keterbatasan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparat pemerintah desa sehingga pemahaman Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pelaksanaan pembangunan fisik yaitu para Teknisi pembangunan masih kurang membuat pembangunan fisik belum tepat sasaran

Kemudian, Nova Sulastri (2016) Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Lakapodo kepada masyarakat. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Lakapodo masih kurang efektif. Pada tahapan pertanggung jawaban dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun oleh pemerintah Desa Lakapodo serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Lakapodo. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa yang mengutamakan

transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan. Sedangkan faktor-faktor penghambat adalah sumber daya manusia yang kurang dari tim pelaksana pengelolaan, informasi, serta kurangnya partisipasi masyarakat.

Senada juga disampaikan Thomas (2012), meneliti Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Hasil kajiannya menunjukkan 30% dari dana desa bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sisanya kurang optimal. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) disinyalir menjadi hambatan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Faisal Nur, Sitti Bulkis dan Hamka Napin (2015), Partisipasi masyarakat di Desa Bialo pada proses pembangunan infrastruktur desa yang dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap persiapan berupa kehadiran dan ide atau pemikiran. Pada tahap pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat berupa sumbangan tenaga, material dan dana. Sementara pada tahap pemeliharaan bentuk partisipasi hanya berupa sumbangan tenaga. Aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi yang ditinjau dari jumlah keluarga sejahtera dan jenis pekerjaan dalam hal ini tipe pertanian memiliki hubungan yang erat dengan partisipasi masyarakat pada semua tahap, sementara tingkat pendidikan hanya berhubungan dengan partisipasi masyarakat pada tahap persiapan sedangkan homogenitas masyarakat tidak mempunyai hubungan terhadap partisipasi masyarakat.

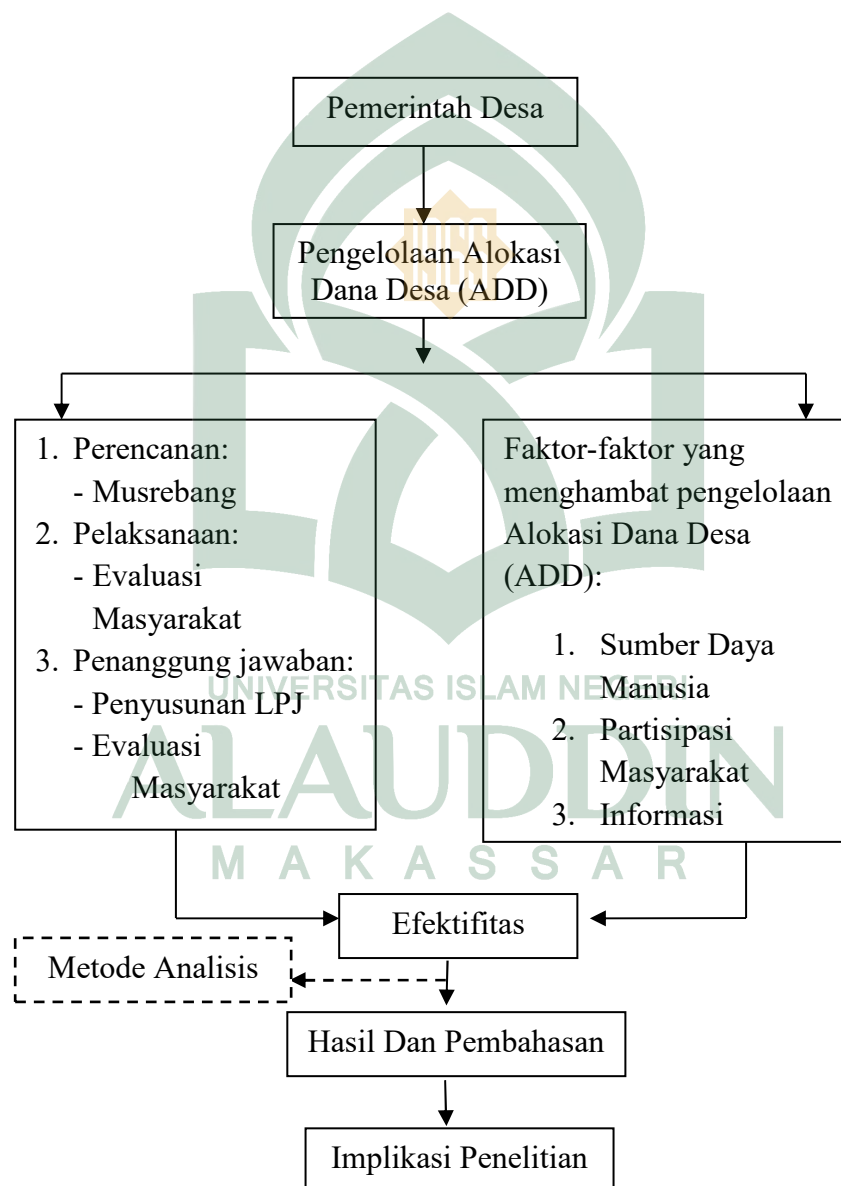
F. Kerangka Konseptual

Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba didasarkan pada peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2016 tentang pengelolaan alokasi dana desa. Melalui Alokasi dana Desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dimana tujuan UU Desa adalah menciptakan masyarakat aktif yang mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.

Untuk itu, dalam proses pengelolaan alokasi dana desa harusnya pemerintah desa tidak hanya berfokus pada penyelesaian seluruh tahapan pengelolaan alokasi dana desa dan hasil akhir berupa terciptanya pembangunan di desa. Namun pemerintah desa harusnya lebih berfokus pada menciptakan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat desa setempat, sehingga pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang berkualitas, yakni sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat desa setempat.

Akan tetapi, dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada Di Desa Sapobonto belum sesuai dengan prinsip pengelolaan alokasi dana desa sehingga berdampak belum efektifnya pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa itu sendiri. Hal tersebut utamanya pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Kondisi inilah yang akan diteliti Di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, terkait dengan bagaimana

Peranan pemerintah desa dalam menerapkan program alokasi dana desa (ADD) terhadap pembangunan di Desa Sapobonto dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan Di Desa Sapobonto Kecamatan bulukumpa kabupaten Bulukumba tahun 2017. Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka konseptual penelitian dapat di gambarkan pada skema dibawah ini :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan sebagai keterwakilan wilayah. Waktu penelitian ini dilaksanakan November sampai Desember.

B. Rancangan penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian Kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang di teliti (Herdiansyah,2010:9)

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer yang dibutuhkan adalah tanggapan pemerintah desa dan masyarakat tentang penyelenggaraan otonomi desa selama ini.

2. *Data Sekunder*

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, kepustakaan dan arsip/laporan seperti:

1. Data-data tentang rincian wewenang yang di berikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan kewewenangan lainnya yang telah ada pada Desa.
2. Data-data tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan geografis, demografis.
3. Data-data lainnya diperoleh dari BPS, Kecamatan, Desa dan instansi lain yang terkait.

D. *Metode Pengumpulan Data*

1. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang relevan dengan penelitian ini, seperti literatur dan berbagai dokumen serta laporan-laporan yang diterbitkan oleh instansi terkait.
2. Studi lapangan yaitu pengumpulan data dimana penulis secara langsung ke obyek penelitian dengan menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:
 - a) Observasi yaitu salah satu metode dalam pengumpulan data secara sengaja, terarah, sistematis, dan terencana sesuai tujuan yang akan di capai dengan mengamati dan mencatat seluruh kejadian dan fenomena yang akan terjadi dan mengacu pada syarat dan peraturan dalam penelitian.

- b) Wawancara yaitu suatu metode dalam mengumpulkan data dengan cara sistematis untuk memperoleh keterangan mengenai masalah yang diteliti berdasarkan tujuan penelitian.

E. Metode Pengolahan Data

1.Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman (1992).

2.Penyajian Data

Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Miles dan Huberman, 1992)

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

F. Teknis Analisis data

Efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Desa dalam merealisasi keuangan Alokasi Dana Desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill (Abbdul Halim,2004).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Desa Sapobonto*

1. *Kondisi Geografis Desa Sapobonto*

Penelitian ini dilakukan di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Sapobonto adalah desa kecil yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Jarak pusat desa dengan ibu kota Provinsi kurang lebih 165 km, jarak pusat desa dengan ibu kota kabupaten yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 32 km, apabila menggunakan waktu tempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor dapat mencapai kurang lebih 1 Jam. Sedangkan jarak pusat desa dengan ibu kota kecamatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 9 km, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Timur : Desa Bontobulaeng/ Desa Bonto Lohe Kec. Rilau Ale
2. Sebelah Utara : Desa Balangtaroang
3. Sebelah Barat : Desa Kassibuleng / Kelurahan Pasir Putih
4. Sebelah Selatan : Desa Tammaona/Desa Kindang

Iklim di desa Sapobonto, sebagaimana wilayah tropis, Desa Sapobonto mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya, yaitu untuk musim kemarau terjadi pada bulan Agustus sampai bulan November, dan untuk musim penghujan terjadi pada bulan Desember sampai bulan Juli. Desa Sapobonto terdiri dari 8 (delapan) dusun yaitu Dusun Sapobonto, Batutempo, Pattoengan, Munte Barat, Ili, Munte Timur, Lempongge dan Lembang.

Mata pencaharian warga Desa Sapobonto adalah petani, selain itu warga Desa Sapobonto berprofesi sebagai Buruh Tani, Pedagang, Tukang Kayu, Tukang

Batu, Buruh Swasta, Pegawai Negeri Sipil(PNS). Sebanyak 65% tergolong sebagai keluarga KK miskin dengan berpenghasilan rata-rata Rp 20.000 per hari.

Tabel 4.1 Jumlah penduduk sesuai dengan Dusun/Lingkungan

No	Dusun	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Jiwa	Jumlah KK
1	Sapobonto	384	395	779	156
2	Batutompo	381	386	767	153
3	Pattoengan	279	286	565	113
4	Munte Barat	358	379	737	147
5	Ili	174	186	360	72
6	Munte Timur	376	381	757	151
7	Lempongngge	382	389	771	154
8	Lembang	256	273	529	105
Jumlah		2.590	2.675	5.265	1.051

Sumber : Kantor Desa Sapobonto Tahun 2016

Dari tabel jumlah penduduk diatas menunjukan bahwa, Desa Sapobonto terdiri dari 8(Delapan) dusun, yaitu Dusun Sapobonto, Batutompo, Pattoengan, Munte Barat, Ili, Munte Timur, Lempongngge dan Lembang, memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.265 jiwa, dimana laki-laki berjumlah 2.590, dan perempuan berjumlah 2.675, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.051 jiwa.

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sapobonto

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
A.	Tingkat Pendidikan			
	▪ Belum sekolah	235	Jiwa	
	▪ SD / sederajat	319	Jiwa	
	▪ SMP / sederajat	368	Jiwa	
	▪ SMA / sederajat	278	Jiwa	
	▪ Diploma 1	3	Jiwa	
	▪ Diploma 2	5	Jiwa	
	▪ Diploma 3	12	Jiwa	
	▪ Strata 1	57	Jiwa	
	▪ Strata 2	5	Jiwa	
	▪ Strata 3	0	Jiwa	

Sumber : Kantor Desa Sapobonto 2016

Dari tabel tingkat pendidikan diatas menunjukan bahwa, pendidikan masyarakat Desa Sapobonto masih sangat rendah dimana masyarakat yang Tidak Tamat SD sebanyak 235 orang, dan yang tamat SD sebanyak 319, SMP sebanyak 368 orang, SMA sebanyak 278 orang dan masyarakat yang jenjang pendidikan Diploma sebanyak 20 orang, serta masyarakat yang jenjang pendidikan Sarjana mencapai 62 orang.

2. Struktur Organisasi

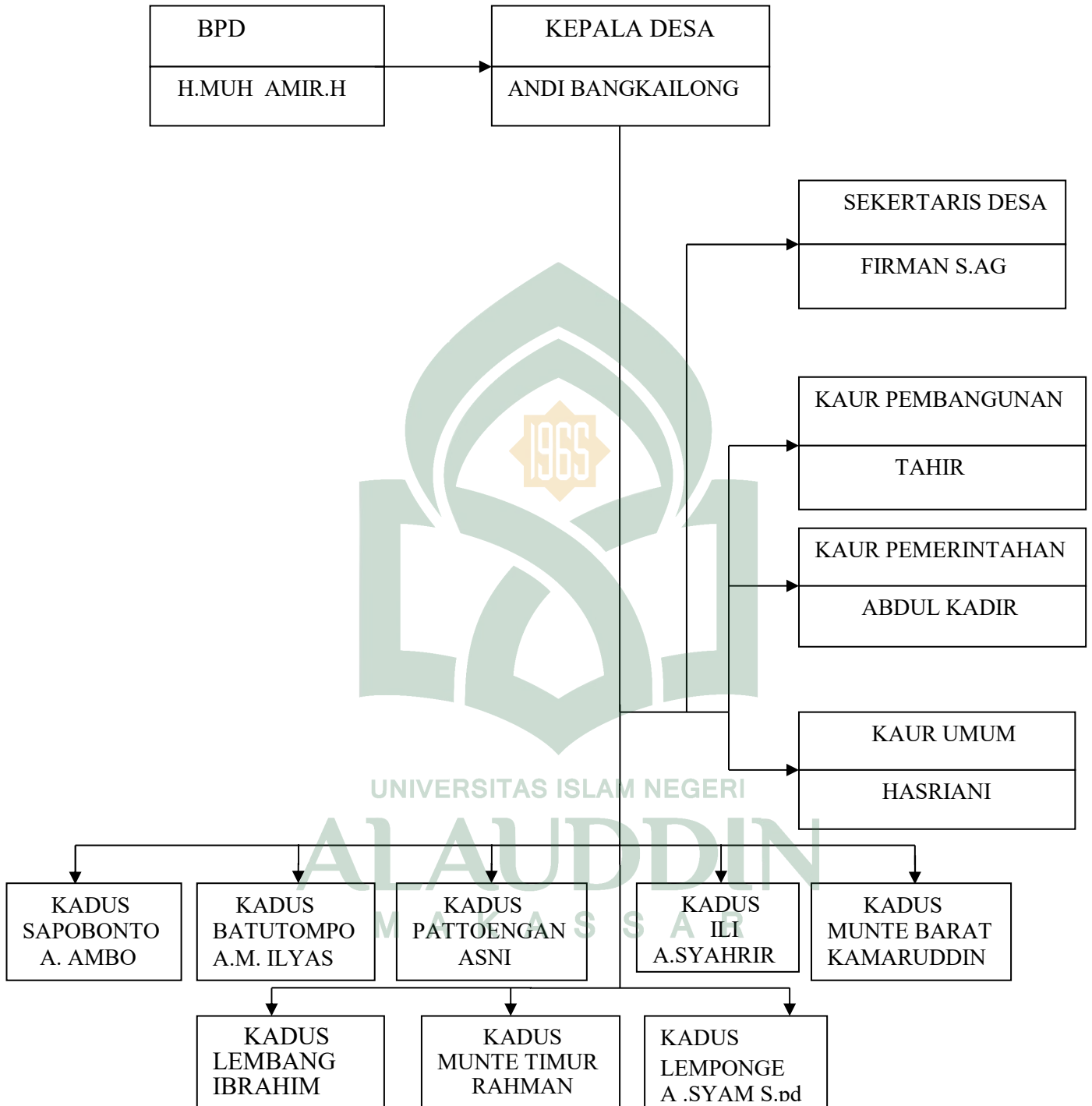
Untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Sapobonto, maka perangkat kerja organisasi masalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan peningkatan

pembangunan menjadi tugas dan tanggung jawab penuh Kepala Desa, dan Bendahara Desa yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa Sapobonto.

Struktur organisasi Desa Sapobonto dalam bidang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan dilengkapi pula dengan tim pengawasan oleh BPD serta pelaksana perencanaan yaitu kaur pembangunan, sehingga peningkatan pembangunan di Desa Sapobonto dapat mencapai target yang optimal.

Pembentukan organisasi dalam lingkup pemerintah Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa agar terjadi sinkronisasi dan etos kerja yang sinergis serta saling menunjang antara satu bidang dengan bidang lainnya dan antara satu seksi dengan seksi lainnya, terutama dalam mengoptimalkan Peranan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa. Selain dari bidang teknis dan pengelolaan alokasi dana desa yang merupakan teknisi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, juga terdapat bidang lain yang menunjang termaksud Sekretaris Desa yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas organisasi yang bekerja langsung di lapangan. Adapun struktur organisasi Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa, sebagaimana di kemukakan pada gambar berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA SAPOBONTO



Gambar 2 Struktur Desa

Sumber: Desa Sapobonto Tahun 2016

3. Deskripsi Responden

Adapun responden dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa dan masyarakat Desa Sapobonto yang berjumlah sebanyak 40 orang. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara langsung dengan responden, dimana peneliti melakukan wawancara langsung di setiap rumah responden, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 40 orang responden. Deskripsi responden pada penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan. Ringkasan dari deskripsi responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah(Orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	30	83,33
2	Perempuan	10	16,67
Total		40	100

Sumber: Data Diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang paling banyak ikut berpartisipasi dalam penelitian ini adalah responden laki-laki yaitu sebanyak 30 orang atau sebesar 83,33% sedangkan sisanya sebanyak 10 orang adalah responden perempuan dengan presentase 16,67%.

Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Jumlah (Orang)	Presentase
1	< 30 Tahun	-	-
2	30-40 Tahun	8	13,33
3	40-50 Tahun	13	26,67
4	> 50 Tahun	19	60
Total		40	100

Sumber: Data Diolah, 2017

Berdasarkan Usia, di Desa Penelitian antara lain berusia diatas 50 tahun sebanyak 19 orang (60%), kemudian responden dengan usia 41 - 50 tahun sebanyak 13 orang (26,67%) sedangkan sisanya usia 30 – 40 tahun sebanyak 8 orang (13,33%).

Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah(Orang)	Presentase
1	Tidak sekolah	2	3,33
2	SD	3	7,67
3	SMP	7	18,55
4	SMA/SMK	13	34,43
5	DIPLOMA	5	12,46
6	SI	8	23,56
Total		40	100

Sumber: Data Diolah, 2017

Berdasarkan tingkat pendidikannya, yang paling banyak ikut berpartisipasi dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK dengan presentase 43,33% atau sebanyak 13 orang, kemudian yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 8 orang dengan presentase 23,56% kemudian sebanyak 7 orang dengan presentase 18,55% adalah responden dengan tingkat pendidikan SMP, kemudian yang memiliki tingkan pendidikan Diploma sebanyak 5 orang dengan presentase 12.46% dan masing-masing sebanyak 5 orang responden memiliki tingkat pendidikan SD dan tidak sekolah.

B. Hasil Penelitian

1. Peranan Pemerintah Desa Dalam Menerapkan Program Alokasi Dana

Desa (ADD) terhadap Pembangunan Di Desa Sapobonto Kecamatan

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

Pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai di implementasikan di Indonesia pada tahun 2005 dengan dasar Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa yang kini telah di pertegas dengan lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat dan di teruskan ke rekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

Ada pun beberapa pendapat dari responden tentang peranan program (ADD) alokasi dana desa terhadap pembangunan di desa Sapobonto, Berikut hasil wawancara penelitian kepada Kepala Desa Sapobonto yaitu Bapak Andi Bangkailong mengenai peranan program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam kegiatan tersebut, yaitu sebagai berikut:

“ Dalam kegiatan program yang di sampaikan kepada masyarakat sudah efektif penyampaian dipaparkan saat musrembang maupun di informasikan kepada masyarakat melaui kepala dusun masing-masing yang ada di desa Sapobonto ”.(Wawancara 28 November 2017).

Sesuai dengan hasil wawancara yang di sampaikan oleh ketua Bumdes

Bapak Ridwan Ra'uf yaitu sebagai sebagai berikut:

“ Peranan Program yang disampaikan aparat desa kepada masyarakat sudah jelas hanya saja sebahagian besar masyarakat belum paham tentang program yang di relisasikan dan hanya menotong pada pembangunan saja sedangkan dampak pemberdayaan masyarakat terkesan begitu-begitu saja ”.(Wawancara 15 Desember 2017).

Hal senada pun di sampaikan oleh Ibu Nurlina tentang peranan pemerintah Desa dalam menerapkan program Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan di Desa Sapobonto, sebagai berikut:

“Kami tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah Desa dan kami tidak mengetahui program-program apa saja yang di lakukan pemerintah setempat, jika memang ada pasti hanya bersifat perseorangan karena saya peribadi tidak pernah mendapat informasi ”.(Wawancara 8 Desember 2017).

Hasil wawancara diatas juga didukung dengan hasil wawancara dengan bapak Hamka yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam kegiatan program alokasi dana desa masyarakat masih kurang mendapatkan informasi, itu pun masyarakat baru paham ketika pelaksanaan itu berupa pembangunan fisik itu pun atas informasi yang di sampaika oleh pihak pengelolah bahwa ini merupakan program alokasi dana itu sendiri ”.(Wawancara 10 Desember 2017).

Dari penjelasan di atas menunjukan walaupun pada akhirnya peranan program kegiatan alokasi dana desa dapat terealisasikan. Namun karena yang di hasilkan tidak berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan serta kurangnya informasi dari pemerintah setempat, maka dapat di katakan pada tahap peranan program alokasi dana desa di desa Sapobonto dalam pembangunan masih kurang baik dan efektif.

2. Pemanfaatan pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus,

menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat Di Desa Sapobonto agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahap perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumba, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipasi dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa. Perencanaan dengan model partisipasi dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Akan tetapi, hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musrembang dalam tahapan perencanaan di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrembang, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6 Tahapan Perencanaan Pengelolaan ADD Desa Sapobonto Dalam Kegiatan Musrembang.

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi (orang)	Persen(%)
Perencanaan	Kegiatan musrembang	Hadir	30	66,66
		Hadir dan berpendapat	-	-
		Tak hadir	10	33,33
		Total	40	100
	Pokok bahasan	Jumlah anggaran	20	66.67
		Penyusunan Rencana	3	10
		Tidak tahu	7	7
		Total	30	100
	Hasil musrembang	Tersusunya DURK	-	-
		Belum tersusunya DURK	20	76,67
		Tidak tahu	10	23,33
		Total	30	100
	Sosialisasi DURK kepada masyarakat	Ada	9	10
		Tidak ada	16	70
		Tidak tahu	5	10
		Total	30	100

Sumber: Data diolah dari kantor Desa Sapobonto Tahun 2017

Keterangan: DURK (Daftar Usulan Rencana Kerja)

Dari tabel diatas, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, kondisi tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi/pendapat dalam musrembang dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dari 40 responden kalangan masyarakat, sebanyak

30 orang atau 66,66 % yang menghadiri kegiatan musrembang desa tersebut, tetapi mereka tidak menyampaikan aspirasi/usulan rencana kegiatan. Sedangkan 10 orang atau 33,33 % lainnya tidak hadir.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada kepala Desa Sapobonto yaitu Bapak Andi Bangkailong mengenai tahapan perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musrembang, yaitu sebagai berikut:

“Dalam kegiatan musrembang yang dilakukan,masih kurangnya partisipasi masyarakat jika dilihat dari segi daftar hadir maupun aspirasi yang di kemukakan oleh masyarakat saat musrembang saat berjalan,masih kurangnya kepedulian terhadap desa”.(Wawancara 28 November 2017).

Selanjutnya Tabel 4.6 diatas juga menunjukan bahwa dalam proses musrembang desa pemerintah kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. dari 30 responden, hanya 3 orang atau 10 % yang mengatakan bahwa dalam musrembang yang dibahas terkait rencana kegiatan yang boleh dilakukan, sebanyak 20 orang atau 66,67 % lainnya mengatakan bahwa dalam musrembang pemerintah desa hanya sekedar memberikan informasi terkait jumlah anggaran yang diterima oleh desa,dan sisanya sebanyak 7 orang atau 25,93 % mengatakan tidak tahu. Informasi ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat yaitu bapak Irwan yang mengatakan bahwa:

“ saya secara pribadi masih kurang paham tentang alokasi dana desa dari segi pembangunan yang di sampaikan oleh aparat pemerintah desa ditambah lagi informasi yang di sampaikan sumpang siur. jadi, sejumlah masyarakat lainnya hanya sekedar menghadiri saja, karena kami tidak tau mau bicara apa”(Wawancara 1 Desember 2017).

Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan musrembang desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Sapobonto tidak berjalan dengan baik,terbukti

tidak adanya rencana kegiatan yang tersusun . Dalam tabel 4.6 Terlihat bahwa 30 responden yang hadir yaitu sebanyak 20 atau 76,67 % sependapat bahwa tidak ada Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan.Sedangkan 10 orang responden lainnya atau 23,33 % mengatakan tidak tahu sebab mereka tidak menghadiri kegiatan musrembang yang bertujuan untuk mengadakan sosialisasi dalam meningkatkan pembangunan Desa Sapobonto.

Oleh karena itu, secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan Di Desa Sapobonto yang tertuang dalam DURK tersebut ditentukan secara pribadi oleh pemerintah desa selaku tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Sapobonto.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua BPD Sapobonto ,yaitu bapak H. Muh Amir H yang menyatakan bahwa:

“Kegiatan musrembang desa yang harusnya mampu menghasilkan berbagai rencana kegiatan dalam penggunaan anggaran alokasi dana desa tidak berjalan sebagai mana mestinya. Dalam kegiatan tersebut selain masyarakat yang hadir hanya sedikit, namun masyarakat yang hadir tidak mengusulkan rencana apapun. Sehingga rencana kegiatan yang ada, semuanya ditentukan oleh pemerintah desa secara sepihak, baik perencanaan pembangunan beton ,Drainase, pekerjaan jalan tani, dan saluran irigasi”.(Wawancara tanggal 29 November 2017).

Penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti hasil wawancara diatas tidaklah menjadi masalah, apabila rencana yang tertuang dalam DURK kembali di informasikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat guna meminta tanggapan masyarakat. Akan tetapi, dari tabel 4.6. diatas terlihat bahwa dari 30 oarng total responden hanya 9 orang atau 10 % mengatakan bahwa DURK di informasikan kepada masyarakat, sebanyak 16

orang atau 70% mengatakan bahwa tidak ada informasi terkait DURK dan sisanya sebanyak 5 orang atau 20% mengatakan tidak tahu.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dusun Munte Timur Desa Sapobonto yaitu bapak Abdul Rahman yang mengatakan bahwa:

“Rencana pembangunan yang di laksanakan oleh desa Sapobonto ini masih kurang informasi atau pemahaman yang di sampaikan oleh aparat desa ke masyarakat itu hanya bersumber pada baliho yang di pasang di depan Kantor Desa. Masyarakat baru paham ketika pelaksanaan itu berupa pembanguna fisik”. (Wawancara tanggal 1 Desember 2017).

Dari penjelasan diatas menunjukan bahwa walaupun pada akhirnya penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam DURK dapat terselesaikan dengan baik. Namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya informasi dari pemerintah desa, maka dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan Di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa masih kurang baik dan efektif.

2. Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan, dengan anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Sapobonto didasarkan pada peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba No. 44 tahun 2016 tentang pengelolaan alokasi dana desa. Alokasi Dana Desa di peruntukan untuk pembangunan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan 38% (tiga puluh delapan persen) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah desa ,serta 62% (enam puluh

dua persen) digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati No. 44 Pasal 3 Tahun 2016 tentang penetapan besaran Alokasi Dana Desa minimum dan Alokasi Dana Desa proporsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun anggaran 2017, besaran Alokasi Dana Desa yang diperoleh Desa Sapobonto adalah sebesar Rp.1,515,754,925 (satu milyar lima ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Adapun terkait Peranan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sapobonto dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.7 Alokasi Penggunaan Anggaran ADD Tahun 2017

Bidang kegiatan	Jenis kegiatan	Anggaran(Rp)	Persen(%)
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Oprasional, Penyusunan, dan pembangunan/ Rehabilitas kantor desa	638,298,027	40,25
Pembangunan Desa	Irigasi,Rambat Beton,Drainase,dan pembinaan BUMdesa	687,378,200	32,18
Pembinaan Kemasyarakatan	PKK,LPMD,Lembaga Keagamaan,Keolahragaan,dan kader posyandu	74,273,898	8,42
Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pelatihan, Penyuluhan dan Peninkatan	115,804,800	19,15
Total		1,515,754,925	100

Sumber :Diolah dari laporan pertanggung Jawaban Desa Sapobonto Tahun 2017

Tabel 4.7 menunjukan bahwa jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Sapobonto adalah sebesar Rp1,515,754,925 dimana pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa oleh pemerintah Desa Sapobonto diperuntuhkan untuk

pembangunan desa, pembinaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintah desa, dan pemberdayaan desa dengan jenis kegiatan yakni, Irigasi, Rambat Beton, Drainase, dan pembinaan BUMdesa dengan anggaran sebesar Rp 687,378.200 atau sekitar 40,25%, PKK Desa, LPMD, Lembaga keamanan, Keolahragaan dan kader posyandu dengan anggaran sebesar Rp 74,373,898 atau sekitar 8,42%, Oprasional, Penyusunan, dan pembangunan/Rehabilitas kantor desa dengan anggaran sebesar Rp 638,298,027 atau sekitar 32,18 %, dan Pelatihan, Penyuluhan, dan Peningkatan dengan anggaran sebesar Rp 115,804,800 atau sekitar 10,15 %.

Informasi yang diperoleh dari responden terkait tahapan pelaksanaan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sapobonto bahwa tingkat partisipasi dari setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih sangat rendah, baik dalam bentuk tenaga ataupun materi dalam mendukung kegiatan pembangunan di Desa. Hal ini terlihat dalam proses kegiatan pembangunan yang ada di Desa Sapobonto yaitu Irigasi, Rambat Beton, Drainase, dan pembinaan BUMdesa. Informasi yang diperoleh dari responden bahwa dalam kegiatan tersebut tidak ada sama sekali partisipasi dari masyarakat untuk mendukung kegiatan tersebut.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Sapobonto yaitu Bapak Andi Bangkailong yang menyatakan bahwa:

“Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pembangunan masih rendah apa lagi dalam pengelolaan dana desa di tahun 2017, lebih banyak di alokasi di kantor desa Sapobonto”. (Wawancara 28 November 2017)

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa masih kurang transparansi dalam memberikan informasi

kepada masyarakat. Kurangnya transparansi informasi yang dimaksud adalah bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan, pemerintah desa tidak terlebih dahulu memberikan informasi atau meminta partisipasi masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan di desa.

Hal ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat , yaitu Ibu Mardiana yang menyatakan bahwa:

“Banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa karena sebagian masyarakat kecewa dan tidak suka dengan kinerja Kepala Desa sekarang selain kurangnya peduli dengan kondisi social masyarakat , juga pilih kasih dan tidak adil dalam memberikan bantuan yang bersumber dari desa”(Wawancara 5 Desember 2017).

Pendapat lain yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat Desa Sapobonto yaitu Bapak Abdul ra’uf yang menyatakan bahwa:

“Kondisi desa saat ini sudah sangat jauh dengan slogan-slogan yang melekat pada desa, seperti kehidupan desa yang harmonis, rasa persaudaraan yang baik dan semangat gotong royong masyarakat desa yang tinggi. Diakibatkan sebagian lapisan masyarakat dalam berpolitik yang mengakibatkan hubungan silaturahmi antar masyarakat maupun hubungan aparat desa yang begitu tak bersinerji.”(Wawancara 5 Desember 2017).

Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa Di Desa Sapobonto ini, dari setiap pembangunan desa dengan anggaran Rp 687,378,200. terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi Terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan di Desa Sapobonto belum efektif. Berikut pernyataan masyarakat terkait kualitas penyelenggaraan pemerintah desa, salah satunya kepala Dusun Desa Sapobonto, Bapak Abdul Rahman yang menyatakan bahwa:

“Banyaknya anggaran yang digunakan untuk operasional pemerintah mulai dari tunjangan dan belanja alat-alat kantor tidak memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah, dilihat dari pelayanan yang diberikan ke pada masyarakat masih kurang efektif dan banyak masyarakat yang mengeluh”.(Wawancara 1 Desember 2017)

Pendapat lain terkait belum efektifnya pencapaian tujuan pengelolaan alokasi dana desa, disampaikan oleh ketua BPD yakni Bapak H. Muh Amir H menyatakan bahwa:

“Kegiatan pembangunan desa yakni salah satunya pembangunan Irigasi, Drainase, dan Rabat Beton. Desa Sapobonto sebenarnya sudah cukup baik karena akan mempermudah dalam aliran air yang mengarah langsung pada sawah masyarakat ini akan menunjang pendapatan bagi petani saat musim panen tiba, maupun saat hasil panen masyarakat lebih mudah mengangkut hasil panen demi berjalanya roda perekonomian. Namun hal ini tidak efektif karena tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh desa masyarakat dan itu dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab mereka sebagai tim evaluasi langsung dari setia kegiatan pembangunan yang terjadi di desa”.(Wawancara 28 November 2017).

Melihat berbagai masalah diatas, walaupun semua rencana yang telah disusun dapat terselesaikan dengan cukup baik. Namun, tahap pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Sapobonto dapat dikatakan kurang efektif.

3. Tahapan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahapan penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa, dalam tahapan pertanggung jawaban ini tidak efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak disusun oleh pemerintah desa, namun penyusunan laporan pertanggung Jawaban ini disusun dan diselesaikan oleh pihak ketiga yang bukan berasal dari pihak pemerintah atau lembaga Desa Sapobonto serta tidak ada transparansi kepada masyarakat,

sehingga masyarakat tidak mengetahui tanggung jawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Tabel 4.8 Penilaian Tahapan Pertanggung jawaban Pengelolaan ADD

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi(orang)	Persen(%)
Pertanggung jawaban	Pihak penyusunan LPJ	Pemerintah desa bersama BPD	5	16,67
		Pihak lainnya	8	23,33
		Tidak tahu	27	60
		Total	40	100
	Kualitas LPJ	Baik	25	63,33
		Tidak tahu	15	36,67
		Total	40	100
	Evaluasi kegiatan bersama masyarakat	Ada	3	6,67
		Tidak ada	29	80
		Tidak tahu	8	13,33
		Total	40	100

Sumber :Diolah dari Kantor Desa Sapobonto Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari total responden sebanyak 5 orang atau 16,67% mengatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) disusun oleh pemerintah desa bersama BPD, sedangkan 8 orang lainnya atau 23,33% mengatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban disusun oleh pihak lainnya yaitu pihak ketiga yang bukan berasal dari unsur pemerintah atau lembaga Desa Sapobonto. Sedangkan sisanya sebanyak 27 orang atau 60% tidak mengetahui siapa pihak yang menyusun laporan pertanggung jawaban Desa Sapobonto tersebut. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa, laporan pertanggung jawaban Desa Sapobonto memang tidak disusun oleh pemerintah desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan, melainkan disusun oleh pihak lainnya.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Sapobonto yaitu Bapak Nasrun A. Ahmad yang menyatakan bahwa:

“Dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban (LPJ) kami tidak memiliki masalah, malahan dari keseluruhan desa yang ada di Bulukumba kami Selalu yang tepat waktu berdasarkan waktu yang telah di tentukan dari Kabupaten”.(Wawancara 12 Desember 2017)

Pernyataan diatas didukung pula oleh hasil wawancara dengan Bapak Firman S.AG selaku Sekretaris Desa Sapobonto,yang menyatakan bahwa:

“Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Sapobonto disusun oleh pemerintah desa selaku penanggung jawab kegiatan yang ada didesa, kualitas sumberdaya Ya sudah maksimum oleh aparatur desa sangat memadai untuk menyusun LPJ,tetapi hal ini harus dimaksimalkan kedepannya”.(Wawancara 12 Desember 2017).

Selanjutnya pada tabel 4.8 diatas menunjukan bahwa Laporan Pertanggung jawaban Desa Sapobonto sudah baik, dimana dari 30 responden sebanyak 19 orang atau 63,33% mengatakan bahwa Laporan Pertanggung jawaban yang dibuat dapat diterima dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) yang dibuat oleh Pemerintah Desa Sapobonto dijadikan percontohan untuk semua desa di kecamatan Bulukumpa.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Sapobonto yaitu Bapak Andi Bangkailong, yang mengemukakan bahwa:

“Desa Sapobonto ini merupakan desa yang cukup baik dalam penyusunan Laporan pertanggung jawaban, selain selalu tepat waktu, LPJ Desa Sapobonto telah dijadikan sebagai LPJ percontohan untuk seluruh desa yang ada di kecamatan Bulukumpa.”(Wawancara 28 November 2017).

Hasil wawancara diatas juga didukung dengan hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Sapobonto yaitu H. Muh Amir H,yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Desa Sapobonto sangat baik dalam menyusun laporan pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran Alokasi dana Desa ini. Dalam LPJ yang dihasilkan tidak pernah ada masalah dan juga selalu tepat waktu, bahkan LPJ Desa Sapobonto sering dijadikan sebagai contoh untuk desa-desa lainya”(Wawancara 28 November 2017).

Salah satu prinsip pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa ini bahwa seluruh kegiatan harus di evaluasi bersama dengan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa dalam tahapan pertanggung jawaban hendaknya pemerintah tidak hanya melakukan pertanggung jawaban kepada pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten, melainkan juga pada masyarakat guna memberikan informasi dan mengevaluasi kegiatan pembangunan yang terjadi di Desa.

Akan tetapi hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah Desa Sapobonto tidak melakukan evaluasi kegiatan pembangunan yang berjalan di desa dengan masyarakat Desa Sapobonto. Dari 30 responden hanya ada 3 orang responden atau 6,67% yang mengatakan bahwa ada evaluasi kegiatan bersama masyarakat Desa Sapobonto dan sebanyak 29 orang responden atau 80% menyatakan bahwa pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat, adapun 8 orang lainnya mengatakan tidak tahu apakah pemerintah desa sudah melakukan evaluasi atas kegiatan yang sudah berjalan atau tidak.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat, yaitu Bapak Anto yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah desa Sapobonto tidak pernah melakukan pembahasan masalah laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat dari segi pembangunan, pemerintahan desa Sapobonto tidak terbuka apakah ada permasalahan di desa.” (Wawancara 15 Desember 2017).

Hasil wawancara diatas senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat lainnya, yaitu Ibu Husni S.pd yang menyatakan bahwa:

“Yang saya ketahui pemerintah desa tidak pernah melakukan pertanggung jawaban di hadapan masyarakat Desa Sapobonto ataupun sosialisasi untuk membahas kendala atau masalah dalam kegiatan pembangunan di Desa Sapobonto ini”(Wawancara 15 Desember 2017).

Berdasarkan informasi yang diperoleh seperti penjelasan di atas, maka walaupun secara Administrasi tahapan pertanggung jawaban oleh pemerintah Desa Sapobonto dapat diselesaikan dengan baik. Namun karena LPJ yang dihasilkan adalah hasil karya pihak ketiga dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Sapobonto namun pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat desa. Maka tahapan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sapobonto dapat dikatakan kurang efektif.

4. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

Faktor-faktor yang menghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dapat diidentifikasi melalui hasil wawancara langsung dengan pemerintah Desa Sapobonto sebagai instansi yang bertugas sebagai pelaksana pengelolaan alokasi dana desa, sampai pada tahap evaluasi dan pelaporan pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan Di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa.

Baik Pemerintah Desa Sapobonto maupun masyarakat desa mengemukakan berbagai faktor yang menjadi penghambat yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sapobonto adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud disini baik berkaitan dengan jumlah maupun kemampuan pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, secara lebih khusus kemampuan Kepala Desa dan Bendahara Desa dalam mengelola alokasi dana desa yang di peroleh dari APBdesa.

Hasil wawancara dengan bapak Andi Bangkailong sebagai Kepala Desa Sapobonto.

“Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah di pemerintahan Desa Sapobonto yang sangat berpengaruh pada perencanaan sehingga diperlukan peningkatan di setiap tahunnya, khususnya aparatur pemerintahan desa sehingga kami berinisiatif melakukan pelatihan kepada di masing-masing bidang untuk dapat meningkatkan keahlian guna untuk menunjang Sumber daya manusia”.(Wawancara 28 November 2017).

Hasil wawancara diatas senada dengan bapak Firman S.AG sebagai Sekretaris Desa Sapobonto menyatakan bahwa:

“Kualitas sumber daya manusia di Desa Sapobonto sebagai faktor internal pada umumnya tergolong sangat rendah, yang disebabkan oleh pendidikan dari aparatur pemerintah desa yang masih kurang, tetapi sebenarnya masalah ini dapat diatasi dengan memberikan bimbingan dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan”.(wawancara, 12 Desember 2017).

Begitu pula hasil wawancara dengan bapak Nasrun A. Ahmad, selaku Bendahara Desa Sapobonto menyatakan bahwa:

“Sumber daya manusia yang masih rendah oleh aparat desa namun dengan kerja sama yang di lakukan dengan saling mengisi satu sama lain sehingga perencanaan yang di lakukan berjalan baik hingga sampai saat ini” .(Wawancara, 5 Desember 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pemabanguna Di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa ini yaitu Sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, dimana kondisi Sumber Daya Manusia

Pelaksana Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Sapobonto masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat Desa Sapobonto.

Hal ini terbukti dengan ketidak mampuan pelaksana kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam membuat Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) sehingga harus menggunakan bantuan pihak ketiga yang bukan dari Tim pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa dan juga bukan merupakan bagian dari Perangkat Desa Sapobonto.

2. Informasi

Informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang jelas. Selain tidak pernah melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan musrembang pemerintah desa juga hanya sekedar menyebutkan nominal Alokasi Dana Desa yang diperoleh. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, bagaimana penggunaan anggaran tersebut, atau bagaimana peranan masyarakat dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut.

Selain itu, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan melalui proses sosialisasi. Informasi yang di peroleh melalui sosialisai yang di adakan pemerintah Desa Sapobonto dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa belum cukup baik. Dimana dari responden, semuanya sependapat bahwa sosialisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten dan Kecamatan hanya sampai pada pemerintah desa selaku pelaksana Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Sedangkan kepada masyarakat tidak ada pelaksanaan sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan. Berikut pernyataan yang di sampaikan oleh salah satu anggota masyarakat, yaitu Bapak Ambo Rappe' yang mengemukakan bahwa:

“Tidak pernah ada sosialisasi kepada kami terkait Pengelolaan alokasi dana desa sebelumnya, jika memang ada pasti hanya bersifat perorangan karena saya pribadi tidak pernah mendapat informasi. Pada saat musrembang di adakan oleh pemerintah desa itu hanya jumlah anggaran yang disebutkan, terkait penggunaan anggaran itu tidak di jelaskan” .(Wawancara 26 Desember2017).

Pendapat lain juga dikemukakan oleh salah satu masyarakat terkait kurangnya informasi dari pihak pemerintah desa yakni Bapak Arifudding yang menyatakan bahwa:

“Kami sebagai masyarakat tidak tahu mengenai tugas dan tanggung jawab kami dalam setiap ada pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, karena kami tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah Kabupaten/Kota bahkan dari pemerintah desa kami tidak pernah mendapatkan informasi mengenai setiap penggunaan anggaran ataupun kegiatan yang akan dilakukan di desa” .(wawancara 10 Desember 2017).

Dari hasil penelitian bahwa kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya pembangunan yang ada di desa.

3. Partisipasi Masyarakat

Peranan partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat, karena masyarakat merupakan bagian dari anggota Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, sebagai Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta aparatur desa perlu menyadari bahwa dalam

pengelolaan alokasi dana desa dibutuhkan partisipasi masyarakat agar pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dapat dialokasikan sesuai yang di rencanakan seperti, pembangunan Irigasi, Drainase, dan Rambat beton.

Namun yang terjadi Di Desa Sapobonto tidak terjadi partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, hal ini ditunjukan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi/pendapat terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan. Berikut

informasi yang diperoleh dari pernyataan Kepala Desa Sapobonto, Bapak Andi Bangkailong yang menyatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat di Desa Sapobonto dalam hal pembangunan masih rendah dan kurangnya kepekaan masyarakat, kepedulian kegiatan sangat rendah”.(Wawancara 28 November 2017).

Hasil penelitian diatas senada dengan yang disampaikan bapak Firman S.AG sebagai Sekretaris Desa Sapobonto menyatakan bahwa:

“Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Namun setiap tahapan di laksanakan partisipasi masyarakat itu masih kurang”(Wawancara 12 Desember 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembanguana Di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa ini yaitu partisipasi masyarakat dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada Di Desa Sapobonto masih tergolong sangat rendah, terbukti dari setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa hampir tidak ada keterlibatan masyarakat.

C. Pembahasan

1. Peranan Pemerintah Desa dalam menerapkan program ADD (Alokasi Dana Desa) dan implikasinya terhadap pembangunan desa Sapobonto kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba

Terkait proses peranan program Alokasi Dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sapobonto kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba, Pemerintah Desa Sapobonto terlebih dahulu menyusun tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan di bantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Selanjutnya, proses pengelolaan alokasi dana desa terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.

Hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan peranan program Alokasi Dana desa dalam meningkatkan pembangunan Di Desa Sapobonto kurang efektif dimana dilakukan dengan melihat proses pelaksanaan di desa, dimana dalam tahapan perencanaan ini di ukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi dalam proses pelaksanaan.

Selain itu, dalam tahapan perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa menunjukan bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap tahapan proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta dalam proses tahapan perencanaan ini kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat

desa baik secara lembaga maupun individu dalam setiap proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pendapat diatas senada dengan hasil penelitian Sumiati (2014) yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Dimana penelitian ini menggambarkan bahwa skala prioritas dalam pelaksanaan program lebih diutamakan. Hal tersebut dikarenakan begitu banyaknya aspirasi yang dikemukakan oleh masyarakat yang berdampak terhadap tidak terlaksananya program lainnya.

Selain begitu banyaknya aspirasi, kegagalan dalam tahapan perencanaan terlihat dari menggelembungnya dana pelaksanaan program desa lainnya yang kemudian menghapus program kerja lainnya yang telah direncanakan seperti yang terjadi pada program kerja pemilihan kepala desa dengan program kerja perjalanan dinas luar daerah sekretaris desa.

2. Manfaat pengelokasian Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan didesa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

Hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan pengalokasian Alokasi Dana desa dalam meningkatkan pembangunan Di Desa Sapobonto kurang efektif dimana dilakukan dengan melihat proses musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan ADD , dimana dalam tahapan perencanaan ini di ukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi dalam proses musrembang desa.

Selain itu, dalam tahapan perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa menunjukan bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap tahapan proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta dalam proses tahapan

perencanaan ini kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga maupun individu dalam setiap proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan ADD di Desa Sapobonto, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sapobonto ini, yaitu: penyelenggaraan pemerintahan Desa Rp 638,298,027, pembangunan desa Rp 687,378,200, pembinaan kemasyarakatan Rp 74,273,898, dan pemberdayaan masyarakat Desa Rp 115,804,800. dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Sapobonto belum efektif.

Dengan demikian tahapan pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sapobonto berjalan dengan baik, akan tetapi walaupun proses pembangunan berjalan dengan baik namun tahapan pelaksanaan ini harus melibatkan masyarakat sebagai tim evaluasi atau tim pengawas dari setiap kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa.

Selanjutnya, tahapan pertanggung jawaban Pengelolaan Alokasi dana Desa di Desa Sapobonto, hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pertanggung jawaban kurang efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) tidak disusun oleh Pemerintah Desa Sapobonto dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Sapobonto. Maka tahapan

petanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sapobonto dapat dikatakan kurang efektif.

Hasil penelitian diatas senada dengan penelitian Abu Raum (2014), bahwa belum terjadi pertanggung jawaban secara langsung kepada masyarakat. hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh Pemerintah Desa sebagai Pengelola Alokasi Dana Desa kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana Alokasi Dana Desa. Analisis tersebut didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai Alokasi Dana Desa diserahkan kepada Kepala Dusun atau Perangkat Desa, sedangkan sebagian besar tidak menginformasikan kepada masyarakat tentang dana yang diterima dari pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi pemerintah Desa Sapobonto dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sapobonto yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa ini yaitu Sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, dimana kondisi Sumber Daya Manusia Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Sapobonto masih sangat

terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat Desa Sapobonto khususnya bendahara Desa Sapobonto hanya tamatan SMA.

Hal ini terbukti dengan ketidak mampuan pelaksana kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sehingga harus menggunakan bantuan pihak ketiga yang bukan dari Tim pelaksana Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan juga bukan merupakan bagian dari Perangkat Desa Sapobonto.

2. Informasi

Dari hasil penelitian salah satu faktor penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya pembangunan yang ada di Desa.

Informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang jelas. Selain tidak pernah melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan musrembang desa pemerintah desa juga hanya sekedar menyebutkan nominal Alokasi dana Desa yang diperoleh. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, bagaimana penggunaan anggaran tersebut, atau bagaimana peran masyarakat dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut.

3. *Partisipasi Masyarakat*

Berdasarkan hasil penelitian setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Di Desa Sapobonto masih kurang baik. Hal ini dari setiap proses tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Sapobonto, dilakukan dengan tiga proses tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban masih kurang baik, dimana terkait dengan masih kurangnya sosialisasi dalam setiap musrembang desa sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat desa, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga ataupun individu dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kondisi tersebut berdampak pula belum efektifnya pencapaian tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Hasil penelitian terkait rendahnya partisipasi masyarakat dan pengawasan oleh masyarakat seperti tersebut diatas, juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aldi (2012). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu belum efektif, beberapa kendala ditemui seperti kurangnya partisipasi masyarakat, serta tidak adanya pengawasan dari lembaga masyarakat utamanya

BPD Aliantan sebagai lembaga desa yang bertugas untuk mengawasi kinerja pemerintah desa.

Selanjutnya, kurangnya partisipasi masyarakat baik secara lembaga maupun individu dalam Pengelolaan Alokasi Dana desa tentu sangat disayangkan. Sebab tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang sekaligus menjadi semangat UU Desa adalah menciptakan masyarakat yang aktif dan mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.

Faktor-faktor penghambat diatas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Thomas (2013) dengan judul penelitian Penegelolaan Alokasi Dana desa dalam upaya meningkatkan pemabngunan di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung sebagai faktor internal yang pada umumnya tergolong rendah, kurangnya koordinasi dari Kecamatan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung Bagian Keuangan masalah surat pertanggung jawaban (SPJ), sebenarnya aturan tentang pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ) tersebut sudah jelas.

D. Implikasi penelitian

Berdasarkan temuan penelitian maka implikasi penelitian mencakup 2 hal yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Dalam implikasi teoritis, implikasi ini berhubungan terhadap penerapan program-program yang berdampak langsung ke pada masyarakat dan peranan pemerintah terhadap pengelolaan alokasi dana

desa. Sedangkang implikasi praktis berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan kinerja pemerintahan desa.

Diharapkan penelitian ini dapat berdampak di antaranya sebagai:

1. Penelitian ini di harapkan akan menambah bahan refrensi atau acuan bagi studi tentang penelitian alokasi dana desa dan penelitian dengan objek yang sejenisnya.
2. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi organisasi sektor publik mengenai tindakan apa saja yang perlu di lakukan untuk meningkatkan kualitas kerja pemerintahan desa.
3. Memberikan perimbangan bagi pemerintah desa dalam proses pemerintahannya agar terhindar dari kepuasan masyarakat akan kinerja pemerintahan desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan Pemerintah Desa dalam menerapkan program Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Peranan Pemerintah Desa dalam menerapkan program Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, dimana dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan alokasi dana desa dapat terealisasi. Namun karena yang di hasilkan tidak berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan serta kurangnya informasi dari pemerintah setempat, maka dapat di katakan pada tahap peran program alokasi dana desa di desa Sapobonto dalam pembangunan masih kurang baik dan efektif.
2. Pemanfaatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah terhadap pembangunan di desa sapobonto kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh

perangkat Desa Sapobonto kepada masyarakat Desa Sapobonto. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Sapobonto masih kurang efektif. Pada tahapan pertanggung jawaban dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggung jawaban tidak disusun oleh pemerintah Desa Sapobonto serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Sapobonto. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.

2. Faktor-faktor penghambat Peranan Pemerintah Desa dalam menerapkan program Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yaitu:

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM)
- 2) Informasi.
- 3) Partisipasi Masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pemerintah Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musrembang,seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Sapobonto kepada masyarakat Desa Sapobonto. Kemudian pada tahap pelaksanaan perlunya aparat Pemerintah Desa Sapobonto melakukan transparansi penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian Alokasi Dana Desa sesuai yang di harapkan. Selanjutnya proses pertanggung jawaban harus dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Sapobonto sendiri dan perlunya evaluasi masyarakat dalam setiap proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. Sebagai Pemerintah Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap tim pengelola Alokasi Dana Desa. Kemudian perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dapat mencapai tujuan dari Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalm Perspektif Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Ed. Ke-1, h. 176
- Ahmadi, A, Uhbiyati, N. (2001). Ilmu pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta.
- Aldy, Riko. 2012. *Tinjauan Yuridis Efektifitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011*
- AL Qur'an surat Al Hadid ayat 7, Surat Shaad ayat 27
- Departemen pendidikan dan Kebudayaan proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah," *Sistem Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Jawa Barat.*" Jakarta 1986 hlm 40.
- Faisal Nur, Sitti Bulkis dan Hamka Napin (2015), *Partisipasi masyarakat di Desa Bialo pada proses pembangunan infrastruktur desa*. Jurnal Ekonomi
- Halim, Abdul.2004:93.Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah-Edisi revisi.Yogyakarta:Upp AMP YKPN.
- Kartasasmita, Ginandjar, 2001. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta : Pustaka CIDESINDO.
- Mudrajad, Kuncoro.2000.*Ekonomi Pembangunan, Teori, masalah dan kebijakan, Cetakan pertama*, Yogyakarta: Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN
- Maria Eni Surasih, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 2
- Nurliana (2013), *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara*. Skripsi
- Nova Sulastri (2016). *Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*.Skripsi
- Peraturan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa Republik Indonesia.
- Peraturan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Republik Indonesia..
- Peraturan PermenDesa PD TT Nomor 22 Tahun 2016 pada pasal 5 tentang pengelolaan keuangan desa Republik 80 sia.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba mengeluarkan Peraturan Bupati Bulukumba Pasal 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Peraturan Undang-Undang Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bulukumba Nomor 44 Tahun 2016 yaitu pada Pasal 1 ayat (5).

Prasetyanto PP, Eko. 2012. *Dampak Alokasi Dana Desa Pada Era Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Daerah di Indonesia*. Disertasi. IPB, Bogor.

Raum Abu, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fiskal Desa Krayan Makmur*. *ejournal ilmu pemerintahan* 2015 : 3 (4) 1623-1636, di akses pada 1 mei 2016.

Saputra I Wayan .2014. *Efektivitas Pengelolaan alokasi dana Desa Pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli*. *Jurnal Pendidikan Ekonom*.

Sumber : Alokasi Dana Desa Sapobonto. Tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017. Kantor Desa Sapobonto, (16/08/17)

Sumber : Data penduduk Desa Sapobonto, Kantor Desa Sapobonto.

Suparno, A. Suhaenah. 2001. *Membangun Kompetensi Belajar*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi : Departemen Pendidikan Nasional.

Slamet, M. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press

Sukanto, Azwardi. 2014. *Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan*. *Journal Economic Development*.

Suksesi. 2007. *Efektifitas Program Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Perekonomian Desa di Kabupaten Pacitan*. Dikutip dalam <http://journalfe.unitomo.ac.id/wp>.

Sumiati. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi*. Di akses Pada 13 mei 2016

Suparno, A. Suhaenah. 2001. *Pembangunan Desa*. Jakarta Erlangga.

- Todaro, Michael, P dan Smith Stephen, C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. *Ejournal pemerintahan integrative*, 1(1):51-
- Todaro. Michael p. 1979. *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*, terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Erlangga. Edisi ke enam.
- Teori pada buku A. Fauzi yang di terbitkan pada tahun 2004
- Todaro. Michael p. 1979. *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*, terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Erlangga. Edisi ke enam
- Tribun Bulukumba. *Alokasi dana Desa tahun 2017*. Bulukumba. UPEKS.co.id . Kantor Bupati Bulukumba (18/1/17).
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Ciyapps Diponegoro University
- Wasisitiono, Sadu dan Irwan Tahir. *Prospek Pengembangan Desa*. Jatinangor: Fokus Media, 2006.
- Welsch, Hilton, Gordon. 2000. *Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba*. Diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudy Warouw. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Widjaja, HAW. (2001). *Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah daerah*.
- Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

L

A

M

P

I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

A

N

Pertanyaan dibawah ini berkaitan dengan Peranan pemerintah Desa dalam menerapkan program Alokasi Dana Desa (ADD) dan implikasinya Terhadap Pembangunan di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama Responden :
Jenis Kelamin : 1. Perempuan 2. Laki-Laki
Umur :
Masa Kerja :
Tingkat Pendidikan : 1. SLTA 2. DIPLOMA 3. S1 4. S2 5. S3
Jabatan Dalam Pelaksanaan :

1. Berapa besar anggaran yang di terima pada tahun 2017 dan apakah sudah cukup untuk mencapai tingkat Peranan pemerintah Desa dalam menerapkan program pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa?
2. Apa dasar hukum pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa berlangsung?
4. Bagaimana kualitas anggota tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa?
5. Bagaimana proses tahapan pengelolaan alokasi dana desa?
6. Pihak -pihak manakah yang dilibatkan dalam setiap tahapan tersebut?
7. Bagaimana kordinasi yang terjalin dari setiap anggota pelaksana?
8. Apakah fasilitas pendukung pengelolaan alokasi dana desa sudah cukup tersedia?
9. Apa saja program kerja terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat?
10. Apakah seluruh tahapan pengelolaan alokasi dana desa dapat terselesaikan dengan baik?
11. Apakah tujuan dari setiap kegiatan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik?
12. Factor –faktor apa saja yang menjadi penghamabt dalam pengeloaan alokasi dana desa?



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II : Jln. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Tlp. 424835 Fax.424836

Hal : Permohonan Judul Skripsi

Acc
tgl 12-7-2017
HS

Kepada Yth,
Bapak Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas ekonomi & Bisnis islam
Universitas Islam Negeri Alauddin

Di
Tempat

Permohonan
Hasbiullah S.E. Msi
Hj. Wahid Abdullah
22/7/17

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AL IRFAN

NIM : 10700113079

Fak/ Jurusan : Ekonomi dan bisnis islam / Ilmu Ekonomi

Semester : Delapan (VIII)

Dengan ini mengajukan judul skripsi sebagai berikut :

1. Peranan program Pemerintah ADD (Anggaran dana Desa) terhadap pembangunan Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
2. Aktivitas Industrialisasi PT. LONSUM Terhadap Penigkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat di Desa Tammatto, Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba.
3. Analisis Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bulukumba.

Demikian permohonan ini untuk dipertimbangkan, atas perhatian Bapak saya ucapkan
banyak terima kasih.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

Dr. Siradjuddin S.E., M.Si.
NIP: 19660509 200501 1 003

Yang Bermohon

AL IRFAN
NIM: 10700113079



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 877 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama **Al Irfan**, Nim: **10700113079** tertanggal **01 Agustus 2018** untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "**Peranan Program Pemerintah ADD (Anggaran Dana Desa) terhadap Pembangunan Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba**"
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu
c. pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 Jo tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Mengangkat/ Menunjuk saudara:
1. **Hasbullah, SE., M.Si.**, Sebagai Pembimbing Pertama.
2. **Hj. Wahida Abdullah, S.Ag., M.Ag.**, Sebagai Pembimbing Kedua.
- Kedua** : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : **Samata-Gowa**
Pada tanggal : **01 Agustus 2018**
Dekan,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag
NIP. 19581022 198703 1 002



ALAUDDIN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 493 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan Ujian Komprehensif Al Irfan : NIM: 10700113079
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk Panitia dan Tim Penguji
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
 4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Komprehensif, Jurusan **ILMU EKONOMI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:

Ketua	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Sekretaris	: Sukmawati, S.Ag.
Penguji Dirasah Islamiyah	: Mustafa Umar, S.Ag., M.Ag
Penguji Ekonomi Mikro Makro	: Akromunnas, SE., M.Si.
Penguji Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan	: Hasbiullah, SE., M.Si.
Pelaksana	: Roshani
 2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
 3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
 4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
 5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

MAKASSAR

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 01 Maret 2018
Dekan,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 0582 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
A.n. Al Irfan, NIM : 10700113079
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Al Irfan, NIM: 10700113079** untuk melaksanakan seminar hasil ;
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **ILMU EKONOMI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Sekertaris : Dr. H. Abd. Wahab, SE., M.Si.
Pembimbing : Hasbiullah, SE., M.Si.
Pembimbing II : Hj. Wahidah Abdullah, S.Ag., M.Ag.
Penguji I : Dr. Urbanus Uma Leu, M.Ag.
Penguji II : Mustakim Muchlis, SE., M.Si.
Pelaksana : Arnidar Hamid, A.Md.

1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Kedua

- : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 14 Maret 2018
Dekan,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 0634 TAHUN 2018**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat permohonan : Al Irfan
NIM : 10700113079
Tanggal : 19 Maret 2018
Mahasiswa Jurusan : ILMU EKONOMI
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul "Peranan pemerintah desa dalam menerapkan program ADD (Alokasi Dana Desa) dan Implikasinya terhadap pembangunan di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukupa Kabupaten Bulukumba"
- Menimbang** : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI. No. 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241 B Tahun 2010 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Sekertaris : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Penguji I : Dr. Urbanus Uma Leu, M.Ag.
Penguji II : Mustakim Muchlis, SE., M.Si.
Pembimbing I : Hasbiullah, SE., M.Si.
Pembimbing II : Hj. Wahidah Abdullah, S.Ag., M.Ag.
Pelaksana : Arnidar Hamid, A.Md.
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 20 Maret 2018

Dekan

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

Nomor : *P-2573* LPP.00.9.2017

Samata, 16 November 2017

Lamp.

Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada,

**Yth. Kepala UPT P2T BKPM
Prov. Sulawesi Selatan**

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini

Nama	: Al Irfan
NIM	: 10700113079
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Ilmu Ekonomi
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Perum Samata Indah Blok E No.6

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya "**Peranan Program ADD (Anggaran Dana Desa) Pemerintah terhadap Pembangunan di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba**"

Dengan Dosen pembimbing:

1. Hasbiullah, S.E., M.Si.
2. Dra. Hj. Wahidah Abdullah, M.Ag., M.Pd.


Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di **Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.**

Demikian harapan kami dan Terima Kasih.

Wassalam

a.n Dekan

Wakil Dekan Bid. Adm. Umum, Perencanaan
dan Keuangan



Dr. H. Abd. Wahab, SE., M.Si.
NIP. 19720421 200801 1 006



Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 16431/S.01P/P2T/11/2017
Lampiran :
Revisi : lain Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Bulukumba

di
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor 7025/ES.UPP.00.9/2017 tanggal 16 November 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : AL IRFAN
Nomor Pokok : 10700113079
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul:

" PERANAN PROGRAM ADD (ANGGARAN DANA DESA) PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA SAPOBONTO KECAMATAN BULUKUMBA KABUPATEN BULUKUMBA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 28 November 2017 s/d 28 Januari 2018

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 27 November 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

ALAUDDIN
M A K A S S A R

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringkat

SAP-PT/2017-2018-2019





PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Alamat : Jalan Durian Nomor 2 Bulukumba, Telp. (0413) 81102 Kode Pos 92511

Bulukumba, 11 Desember 2017

Nomor : 070/1003/Balitbangda/XII/2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Camat Bulukumba
Kab. Bulukumba
di
Bulukumba

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Makassar, Nomor:16451/S.01P/P2T/11/2017 tanggal 27 Desember 2017, perihal Izin Penelitian, maka yang tersebut di bawah ini:

Nama : **AL IRFAN**
Nomor Pokok : 10700113079
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud melakukan penelitian/pengambilan data di Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba dalam rangka penyelesaian tugas akhir (Skripsi) dengan judul **"PERANAN PROGRAM ADD (ANGGARAN DANA DESA) PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA SAPOBONTO KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA"** yang akan berlangsung pada tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan 28 Januari 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

M A K A S S A R



MUHAMMAD AMRAL, SE., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19620416 199305 1 004

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
3. Arsip.

DOKUMENTASI WAWANCARA









UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



Al-Irfan, Lahir pada tanggal 1 Desember 1994, di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak terakhir dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Mahdya dan Ibu Harlina.

Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SD Negeri 91 Munte pada tahun 2000 dan tamat pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke MTS Negeri Tanete dan tamat pada 2009. Pada tahun yang sama penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke MAN Al-Ikhwan Pasir Putih di Kabupaten Sinjai dan tamat pada tahun 2012. Dan pada tahun 2013 penulis kemudian terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ilmu Ekonomi melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan telah menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) pada tahun 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R